



COREinsight

MANUVER STRATEGIS INDONESIA MENGHADAPI BADAI TARIF RESIPROKAL



Temuan Utama:

- **Eskalasi Ketegangan Perdagangan Global**

Kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025 menandai fase baru dalam perang dagang global dengan skala yang lebih masif. Pengenaan tarif dasar 10% untuk seluruh barang impor dan tambahan tarif resiprokal untuk Indonesia dan 56 negara lainnya, menciptakan guncangan signifikan pada struktur perdagangan internasional.

- **Asimetri dalam Klaim Ketidakadilan Perdagangan**

Meskipun AS mengklaim Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan "tidak adil", data WTO menunjukkan bahwa AS justru memiliki jumlah kebijakan non-tarif terbanyak (6,665) dibandingkan Indonesia yang hanya menerapkan 350 kebijakan. Ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam narasi yang dibangun oleh AS.

- **Surplus Perdagangan Jasa yang Terabaikan**

AS secara strategis hanya menyoroti defisit perdagangan barang, namun mengesampingkan fakta bahwa mereka menikmati surplus perdagangan jasa yang signifikan dengan Indonesia sebesar USD 1,49 miliar (2022), terutama dari sektor jasa keuangan dan hak kekayaan intelektual.

- **Keterpaparan Sektor Ekspor Vital Indonesia**

Sebagai bagian dari "Dirty 15," Indonesia menghadapi pukulan telak dengan tarif 32% yang mengancam sektor-sektor vital, termasuk industri tekstil dan garmen (61%), alas kaki (USD 1,9 miliar pada 2023), furnitur (57%), karet (49,7% ban karet dan 23,2% karet alam), serta elektronik dan peralatan listrik (63,3%). Ketergantungan ini menciptakan kerentanan struktural dalam perdagangan eksternal Indonesia.

- **Guncangan Makroekonomi yang Menyeluruh**

Kebijakan tarif tidak hanya berdampak pada kinerja ekspor, tetapi juga berpotensi menciptakan efek domino terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia, termasuk perlambatan pertumbuhan PDB, tekanan pada nilai tukar rupiah, inflasi, ketenagakerjaan, serta penerimaan fiskal.

- **Ancaman Lonjakan Impor pada Pasar Domestik**

Pembatasan dan Penutupan pasar AS terhadap produk dari negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam berpotensi mengalihkan arus ekspor mereka ke Indonesia, menciptakan risiko lonjakan impor ke Indonesia yang dapat merugikan produsen lokal dan melumpuhkan industri dalam negeri.



Manuver Dagang Agresif Trump dan Tantangannya bagi Indonesia

Presiden Donald Trump kembali meluncurkan strategi dagang yang agresif terhadap sejumlah mitra utama Amerika Serikat. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan strategi tarif ganda yang mengejutkan: tarif dasar sebesar 10% diberlakukan untuk seluruh barang impor dari negara-negara mitra dagang AS, ditambah tarif tambahan terhadap 57 negara yang dinilai merugikan neraca perdagangan Negeri Paman Sam. Indonesia yang mencatatkan surplus perdagangan sebesar 14,2 miliar terhadap AS pada 2024, turut menjadi sasaran kebijakan ini. Sebagai konsekuensinya, produk-produk ekspor Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32%. Kebijakan tersebut menandai dimulainya babak baru perang dagang dalam skala yang jauh lebih luas. Indonesia, yang masuk dalam kelompok *'Dirty 15'*, kini menghadapi tekanan ekonomi yang tidak kecil akibat langkah tersebut, yang berpotensi memicu ketegangan bilateral.

Kebijakan ini bukan sekadar kelanjutan pendekatan keras terhadap perdagangan global, melainkan eskalasi serius dalam ketegangan dagang internasional. Bagi Indonesia, pemberlakuan tarif tinggi ini tidak hanya mengancam sektor ekspor unggulan, tetapi juga bisa mengguncang stabilitas ekonomi makro. Dampak yang harus diantisipasi antara lain terhambatnya pertumbuhan PDB, meningkatnya tekanan pada kebijakan fiskal dan moneter, serta melemahnya minat investasi dan kinerja perdagangan jasa, suatu kombinasi risiko yang dapat menggerus daya tahan ekonomi nasional.

Kendati pada 10 April 2025 Trump mengumumkan penundaan implementasi tarif tambahan selama 90 hari untuk sebagian besar negara (kecuali Tiongkok), dinamika dua pekan terakhir telah menimbulkan gejolak besar dalam sistem perdagangan global.



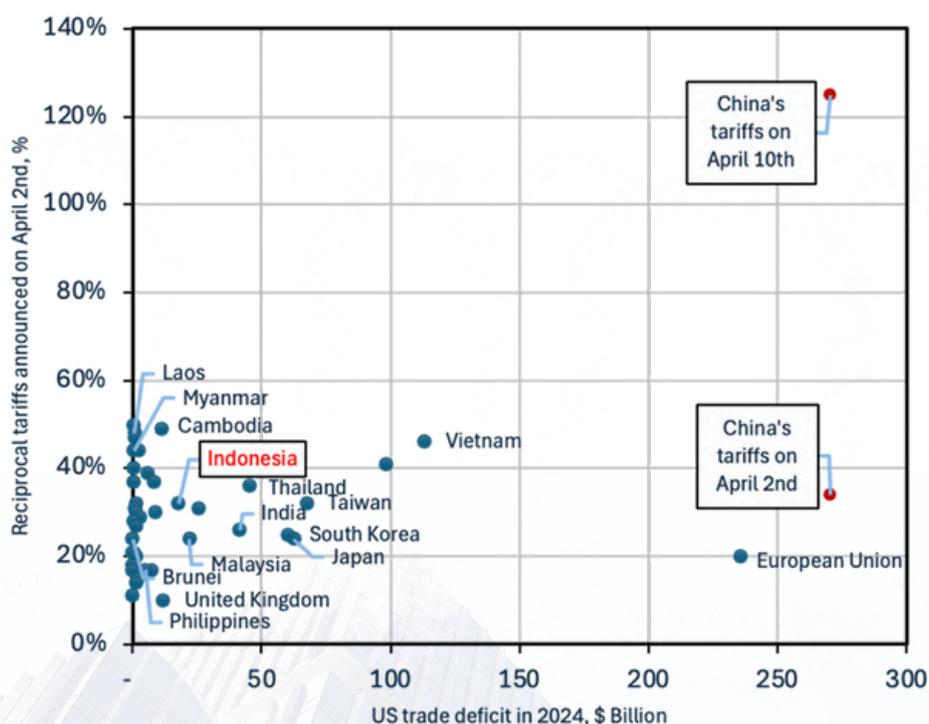
Indonesia yang mencatatkan surplus perdagangan sebesar 14,2 miliar terhadap AS pada 2024, turut menjadi sasaran kebijakan ini. Sebagai konsekuensinya, produk-produk ekspor Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32%. Kebijakan tersebut menandai dimulainya babak baru perang dagang dalam skala yang jauh lebih luas. Indonesia, yang masuk dalam kelompok *'Dirty 15'*, kini menghadapi tekanan ekonomi yang tidak kecil akibat langkah tersebut, yang berpotensi memicu ketegangan bilateral.

Tarif yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku pada 9 April 2025 menciptakan ketidakpastian tinggi, dengan perubahan kebijakan yang berlangsung sangat cepat. Dalam iklim seperti ini, perubahan mendadak bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu merespons secara hati-hati dan berdasarkan perhitungan matang.

Tindakan reaktif justru berisiko memperburuk keadaan, seperti yang terjadi pada Tiongkok, yang pada 11 April 2025 menaikkan tarif atas barang asal AS hingga 125%, hanya beberapa hari setelah Presiden Xi Jinping menyampaikan pesan damai soal "tak ada pemenang dalam perang tarif". Langkah balasan tersebut segera dibalas oleh AS dengan menaikkan tarif hingga 145%. Sementara itu, sejumlah perusahaan besar seperti Apple berhasil menegosiasikan pengecualian untuk produk-produk elektronik, menunjukkan bahwa di balik kebijakan garis keras Trump masih ada ruang negosiasi. Celah inilah yang dapat dijadikan strategi oleh Indonesia dalam menyikapi perkembangan selanjutnya.



Sejumlah perusahaan besar seperti Apple berhasil menegosiasikan pengecualian untuk produk-produk elektronik, menunjukkan bahwa di balik kebijakan garis keras Trump masih ada ruang negosiasi. Celah inilah yang dapat dijadikan strategi oleh Indonesia dalam menyikapi perkembangan selanjutnya.



Grafik 1. Tarif Resiprokal untuk 57 dan Defisit Perdagangan AS
Sumber: USTR dan Lampiran I pada dokumen Executive Order.

Dinamika dua pekan terakhir menunjukkan ketidakstabilan yang perlu diwaspadai. Trump memang menyatakan bahwa perang tarif ini bertujuan memangkas defisit perdagangan AS yang konsisten terjadi sejak 1976. Namun perlu dicermati tujuan yang tertuang dalam dokumen *Executive Order*: keinginan AS untuk mendominasi produk manufaktur dan pertanian di pasar global. Dengan tarif resiprokal untuk 57 negara, Trump memaksa pemerintah negara-negara tersebut bernegosiasi dengan AS. Negara yang tidak kooperatif akan menghadapi sanksi berupa kenaikan tarif resiprokal (*Executive Order* poin 4b dan 4c).

Pemerintah Indonesia harus menganalisis langkah AS ini dengan cermat dan kepala dingin. Nilai utama dalam negosiasi adalah mengamankan kepentingan ekonomi nasional. Negosiasi dengan AS tidak boleh berdampak negatif pada stabilitas makroekonomi dan neraca perdagangan Indonesia, memperburuk kehidupan petani, mengingat sebagian besar impor dari AS adalah produk pertanian yang menjadi sumber penghidupan petani lokal, atau mematikan potensi pembangunan industri perantara domestik. Tim negosiator pemerintah harus bersiap dengan data komprehensif untuk mematahkan tuduhan Trump terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia juga perlu mewaspadai tantangan tersembunyi: potensi serbuan produk manufaktur berharga murah (*dumped imports*) ke pasar domestik dan lonjakan impor produk pertanian dari AS serta negara lain.

Dinamika perang dagang ini harus menjadi momentum strategis untuk memperkuat struktur ekonomi domestik. Indonesia perlu mendorong industri manufaktur beroperasi lebih efisien dan produktif agar mampu bersaing di pasar global. Indonesia juga harus menstabilkan institusi pasar produk pertanian domestik, sehingga petani dapat menikmati penghidupan yang layak. Perlu diingat, untuk komoditas kedelai, Indonesia pernah mencapai swasembada dari petani lokal selama empat dekade (1934-1974), prestasi yang membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar impian kosong.



Nilai utama dalam negosiasi adalah mengamankan kepentingan ekonomi nasional. Negosiasi dengan AS tidak boleh berdampak negatif pada stabilitas makroekonomi dan neraca perdagangan Indonesia, memperburuk kehidupan petani, mengingat sebagian besar impor dari AS adalah produk pertanian yang menjadi sumber penghidupan petani lokal, atau mematikan potensi pembangunan industri perantara domestik.

Mengapa Trump Menghunus Senjata Tarif

Trump kembali menjalankan strategi perdagangan yang konfrontatif pada 2 April 2025 dengan dalih utama: ketidakseimbangan kerja sama dagang antara AS dan negara mitranya. Dalam narasi Trump, kurangnya timbal balik yang adil ini berakar pada empat kebijakan "tidak adil" yang diterapkan oleh sekutu dagang AS: kebijakan tarif yang timpang, hambatan non-tarif yang merugikan AS, strategi upah rendah yang mematikan daya saing produk AS, dan manipulasi mata uang serta pajak yang mendistorsi pasar global.

Trump menyebut keempat praktik ini sebagai "*structural asymmetric*", asimetri struktural yang menciptakan lubang hitam defisit perdagangan AS, menghambat pertumbuhan sektor manufaktur dan pertanian Amerika. Klaim ini menjadi landasan bagi kebijakan tarif resiprokal yang kini menghantam 57 negara, termasuk Indonesia.

Trump menyodorkan perbandingan tarif sebagai bukti "kemurahan hati" AS selama ini. Ia menyebut AS telah menerapkan *most-favored-nation* (MFN) terendah di dunia sebesar 3,3%, sementara negara lain justru mematok tarif jauh lebih tinggi: Brazil (11,2%), Tiongkok (7,5%), Uni Eropa (5%), India (17%), dan Vietnam (9,4%). Trump secara khusus menyoroti Indonesia yang dianggap "tidak adil" dengan menerapkan tarif 30% untuk etanol, sementara AS hanya mematok 2,5%.

Tidak berhenti di situ, Trump menyerang hambatan non-tarif yang diklaimnya telah "memblokade" produsen AS dari pasar global. Dokumen United States Trade Representative (USTR) merinci hambatan ini secara tajam, mulai dari restriksi perizinan impor, hambatan teknis perdagangan, pembatasan sanitari, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual yang lemah. Trump menegaskan hambatan ini telah merampas akses produsen AS ke pasar global.



Dalam narasi Trump, kurangnya timbal balik yang adil ini berakar pada empat kebijakan "tidak adil" yang diterapkan oleh sekutu dagang AS: kebijakan tarif yang timpang, hambatan non-tarif yang merugikan AS, strategi upah rendah yang mematikan daya saing produk AS, dan manipulasi mata uang serta pajak yang mendistorsi pasar global.

Trump menggambarkan industri manufaktur AS sebagai korban utama dari ketidakadilan perdagangan ini. Pangsa pasar manufaktur AS di pasar global anjlok drastis menjadi 17,4% pada 2023 dari puncaknya 28,4% pada 2001. Kini, sektor manufaktur AS hanya menyumbang 11% dari total PDB Amerika. Lebih menyengat lagi, Trump mengklaim penurunan kinerja manufaktur ini telah menghapus 5 juta lapangan kerja selama periode 1997–2024.

Sektor pertanian juga tidak luput dari narasi kerugian ini. Trump dengan lantang mengatakan bahwa surplus perdagangan produk pertanian yang ditinggalkannya pada Januari 2021 kini telah berubah menjadi defisit yang mencapai USD 49 miliar per tahun, sebuah kemunduran yang ia tuduhkan pada "serbuan hambatan non-tarif baru" dari negara-negara sekutu dagang AS, termasuk Indonesia.

Melalui kebijakan tarif resiprokal, Trump mengejar agenda ambisius: mengembalikan dominasi AS dalam rantai pasok dan pasar global, khususnya untuk produk manufaktur dan pertanian. Target penguasaannya mencakup industri strategis: otomotif, perkapalan, farmasi, teknologi, peralatan mesin, logam, pertahanan, baterai, mikroelektronik, dan pertanian.

Agenda penguasaan pasar global ini harus dipahami secara mendalam oleh tim negosiator Indonesia. Langkah taktis jangka pendek tidak boleh mengorbankan kepentingan ekonomi jangka panjang dalam negeri.

Mengapa Tarif 32% Menghantam Kita?

Kritik tajam terhadap Indonesia terangkum dalam dokumen USTR (*United States Trade Representative*) bertajuk '*2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*' halaman 212-225. USTR dengan tegas menuduh Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan yang "tidak adil" dan merugikan AS, terutama dalam hal tarif, pajak, hambatan non-tarif, dan kuota.



Melalui kebijakan tarif resiprokal, Trump mengejar agenda ambisius: mengembalikan dominasi AS dalam rantai pasok dan pasar global, khususnya untuk produk manufaktur dan pertanian. Target penguasaannya mencakup industri strategis: otomotif, perkapalan, farmasi, teknologi, peralatan mesin, logam, pertahanan, baterai, mikroelektronik, dan pertanian.

Dalam hal tarif, USTR menyoroti Indonesia yang menetapkan tarif MFN lebih tinggi dibanding AS: 8,6% untuk produk pertanian dan 7,9% untuk produk non-pertanian pada 2023. Indonesia juga dituding telah meningkatkan penetrasi tarif untuk produk-produk yang bersaing dengan produsen dalam negeri, seperti elektronik, obat-obatan, kosmetik, dan produk pertanian. Beberapa produk non-pertanian bahkan dikenakan tarif mencapai 35,5%, sementara sektor pertanian menghadapi tarif rata-rata di atas 25%. USTR dengan tegas menyatakan angka-angka ini melampaui batas yang ditetapkan WTO.

USTR juga mengkritik keras kebijakan pajak cukai barang impor Indonesia yang dianggap tidak transparan dan eksekutif. Contohnya, minuman beralkohol 5-20% dikenakan cukai 24% lebih tinggi untuk produk impor dibanding produk domestik.

Senjata kritik USTR berikutnya adalah kebijakan non-tarif Indonesia, terutama sistem perizinan impor yang disebut rumit dan memberatkan. Indonesia juga dituding memperluas cakupan produk yang harus melalui perizinan impor dari lima komoditas menjadi 19 produk. Mulai 2025, Indonesia bahkan memasukkan bawang putih ke dalam cakupan perizinan impor, dan berencana menambahkan apel, anggur, dan jeruk pada 2026.

USTR juga menyoroti kebijakan kuota untuk produk pertanian, seperti gula, yang didasarkan pada produksi dan konsumsi dalam negeri. Pabrik gula hanya diperbolehkan mengimpor jika tidak memenuhi kapasitas penggilingan. Industri farmasi AS juga terkena dampak dari kebijakan yang mengharuskan perusahaan obat-obatan AS menggandeng perusahaan lokal untuk mendapatkan persetujuan impor.

Peran pemerintah dalam pengaturan impor, seperti monopoli impor jagung oleh BULOG, juga dikritik tajam. Kebijakan-kebijakan ini dianggap secara sistematis menghalangi perusahaan-perusahaan AS dalam menjangkau pasar Indonesia.



USTR menyoroti Indonesia yang menetapkan tarif MFN lebih tinggi dibanding AS: 8,6% untuk produk pertanian dan 7,9% untuk produk non-pertanian pada 2023. Indonesia juga dituding telah meningkatkan penetrasi tarif untuk produk-produk yang bersaing dengan produsen dalam negeri, seperti elektronik, obat-obatan, kosmetik, dan produk pertanian.

Daftar keluhan tidak berhenti di situ. USTR juga mengkritik hambatan bea cukai, ketidakseragaman penentuan bea masuk, hambatan teknis seperti sertifikasi sanitari dan halal, preferensi pengadaan pemerintah untuk produk lokal, persyaratan kandungan lokal (TKDN), serta pembatasan dalam sektor jasa seperti perfilman yang mengharuskan 60% kuota untuk film Indonesia.

Kebijakan fiskal dan non-fiskal Indonesia untuk industri manufaktur juga menjadi target kritik karena dianggap tidak transparan dengan WTO. Terakhir, kebijakan Neraca Komoditas dan Aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dituding berdampak negatif pada arus kas perusahaan internasional.

Tapi, Apakah Klaim Trump Sepenuhnya Tepat?

Perhitungan tarif resiprokal AS tidak hanya mempertimbangkan tarif tradisional, tetapi juga berbagai kebijakan non-tarif yang dianggap menghambat masuknya produk AS ke pasar Indonesia. Yang menarik, tarif impor rata-rata Indonesia terhadap produk AS (8,56%) sebenarnya lebih rendah dari tarif yang dikenakan oleh beberapa negara lain seperti India (12,63%), Thailand (9,82%), atau Vietnam (9,13%). Contoh konkret, misalnya, produk alas kaki dan pakaian Indonesia yang diekspor ke AS dikenakan tarif rata-rata 11–14%, sementara mesin dan peralatan AS yang diekspor ke Indonesia dikenakan tarif 4–5% (DEN 2025).

Kemudian, untuk kebijakan non-tarif yang dianggap sangat merugikan perusahaan-perusahaan AS untuk ekspansi pasar ke Indonesia, justru tidak terbukti. Data WTO sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1 yang justru memperlihatkan kebalikan dari klaim-klaim USTR di atas. Kebijakan non-tarif AS adalah salah satu yang tertinggi di antara anggota-anggota WTO lainnya (Tabel 1).

Dari total sembilan jenis kebijakan non-tarif, mulai dari Sanitary dan Phytosanitary (SPS) sampai dengan Export Subsidies (XS), AS adalah negara dengan jumlah kebijakan restriksi non-tarif terbanyak dengan total kebijakan non-tarif mencapai 6,665. Di bawahnya, ada Brazil (3,616), Tiongkok (3,223), dan Uni Eropa (2,802). Sementara itu, Indonesia hanya mengeluarkan 350 kebijakan non-tarif. Artinya, kebijakan non-tarif Indonesia hanya 5,3% dari total kebijakan non-tarif AS. Dengan data ini, lalu, masih layakkah AS menyebut Indonesia menggunakan pendekatan *protectionist* dalam kebijakan dagangnya, sebagaimana yang dituduhkan dalam dokumen USTR?



Dari total sembilan jenis kebijakan non-tarif, mulai dari Sanitary dan Phytosanitary (SPS) sampai dengan Export Subsidies (XS), AS adalah negara dengan jumlah kebijakan restriksi non-tarif terbanyak dengan total kebijakan non-tarif mencapai 6,665. Di bawahnya, ada Brazil (3,616), Tiongkok (3,223), dan Uni Eropa (2,802). Sementara itu, Indonesia hanya mengeluarkan 350 kebijakan non-tarif.

Negara	Jenis Kebijakan Non-Tarif Beserta Jumlahnya									Total
	SPS	TBT	ADP	CV	SG	SSG	QR	TRQ	XS	
USA	3315	2043	505	179	3	496	59	52	13	6665
Brazil	2012	1418	166	3				1	16	3616
China	1384	1652	123	11	1		42	10		3223
European Union	969	1487	144	26		71	18	87		2802
Japan	956	960	9			173	85	18		2201
Korea	746	1158	43			75	92	67		2181
Thailand	506	760	58		2		112	23		1461
Australia	532	239	88	18			178	2	6	1063
India	276	273	376	26	4		59	3		1017
Vietnam	137	217	26	1	4			2		387
Malaysia	53	273	32		3			13		374
Indonesia	142	142	52		11			2	1	350
United Kingdom	12	65			1					78
Cambodia		22								22

Tabel 1. Jumlah dan Jenis Kebijakan Non-tarif yang Diterapkan oleh Beberapa Negara

Catatan: SPS (Sanitary and Phytosanitary); TBT (Technical Barriers to Trade); ADP (Anti dumping); CV (Countervailing); SG (Safeguards); SSG (Special Safeguards); QR (Quantitative Restrictions); TRQ (Tariff-rate quotas); XS (Export Subsidies). Data per Desember 2024.

Sumber: WTO (2025)

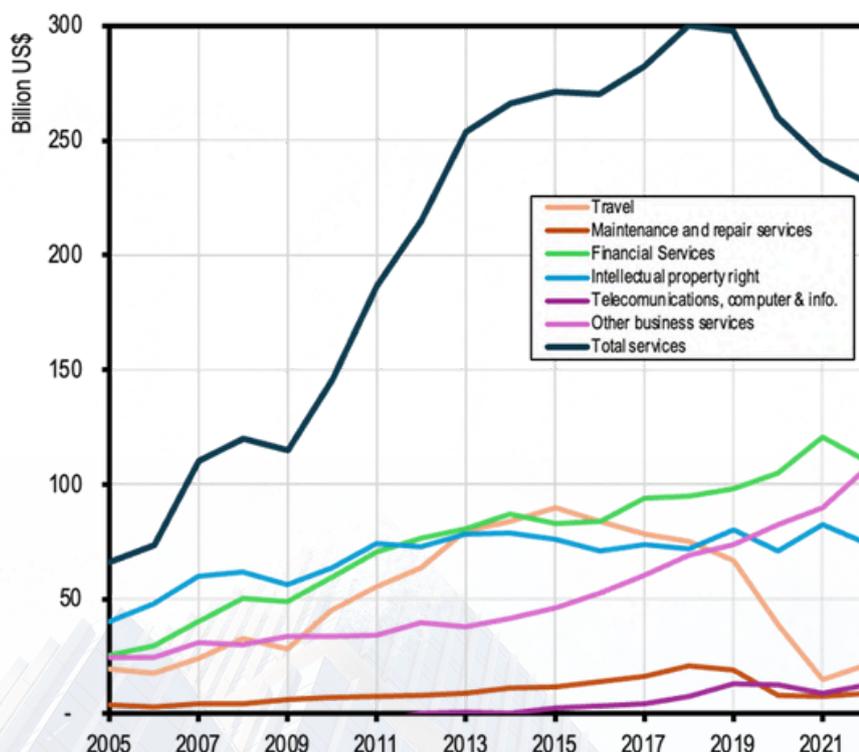
Secara khusus AS juga mengklaim, Indonesia telah merugikan perusahaan-perusahaan AS dari sisi kebijakan SPS, TBT, QR, TRQ, dan XS. Padahal, merujuk data WTO di dalam Tabel 1, jelas bahwa semua kebijakan non-tarif AS lebih tinggi daripada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Jumlah kebijakan SPS Indonesia, misalnya, hanya 4,3% dari total SPS yang diterapkan AS. TBT Indonesia hanya 6,9% dari total TBT AS. Bahkan Indonesia tidak punya kebijakan quantitative restrictions, yang mana AS menerapkannya sebanyak 52 kebijakan pada produk impor ke pasar AS.

Selain klaim bahwa Indonesia terlalu ketat dari sisi kebijakan non-tarif, AS juga menutup-nutupi fakta bahwa sebetulnya AS memiliki surplus perdagangan jasa yang sangat besar dengan negara sekutu dagangnya. Grafik 2 menunjukkan, AS memiliki surplus perdagangan jasa yang mencapai rata-rata USD 250 miliar selama periode 2010-2023. Sebuah surplus yang amat besar, tapi tidak pernah disebut oleh Trump. Surplus terbesar disumbang oleh sektor jasa keuangan dan hak kekayaan intelektual, yang masing-masing mencapai USD 110 miliar dan 74 miliar pada 2022. Berbagai jasa lainnya juga meningkat dengan sangat konsisten sejak 2005 hingga 2022. Terakhir, surplus dari jasa-jasa lainnya mencapai USD 107 miliar.

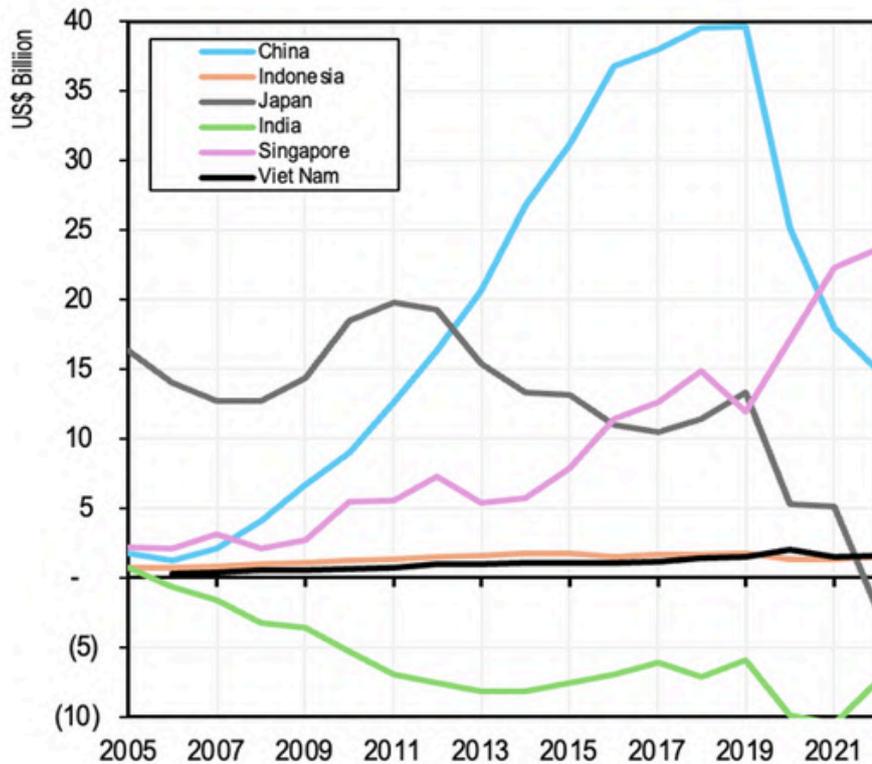


AS juga menutup-nutupi fakta bahwa sebetulnya AS memiliki surplus perdagangan jasa yang sangat besar dengan negara sekutu dagangnya. Grafik 2 menunjukkan, AS memiliki surplus perdagangan jasa yang mencapai rata-rata USD 250 miliar selama periode 2010-2023.

Jika dilihat berdasarkan negara, AS mengalami surplus perdagangan jasa mencapai USD 1,49 miliar dengan Indonesia pada 2022 (Grafik 3). Kemungkinan besar, surplus ini datang dari jasa hak kekayaan intelektual, jasa keuangan, telekomunikasi (seperti penjualan perangkat lunak komputer), dll. Maka itu, klaim USTR bahwa Indonesia cenderung *protectionist* dalam perdagangan jasa sangat tidak tepat.



Grafik 2. Surplus Perdagangan Jasa AS Berdasarkan Jenis Produk, 2005-2022
Sumber: Trademap



Grafik 3. Surplus Perdagangan Jasa AS Berdasarkan Negara Mitra Dagang, 2005-2022
Sumber: Trademap

Pukulan Telak bagi Sektor Unggulan Ekspor Indonesia

Penerapan tarif resiprokal 32% oleh AS berpotensi menghajar kinerja ekspor Indonesia di berbagai sektor vital. Industri tekstil dan garmen berada di garis depan keterpaparan ini, dengan tarif AS untuk produk pakaian Indonesia yang sudah mencapai 11-14,7% sebelum tambahan 32%. Dengan 61% ekspor pakaian Indonesia bergantung pada pasar AS, industri ini praktis terperangkap dalam dilema ketergantungan yang berbahaya. Reputasi produk garmen Indonesia yang selama ini dibangun atas dasar keseimbangan kualitas dan harga kompetitif kini terancam terguncang oleh lonjakan tarif yang dapat mengeliminasi dari persaingan global.

Sektor alas kaki Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah berat, dengan nilai ekspor ke AS mencapai USD 1,9 miliar pada 2023. Tarif dasar 11,4% untuk alas kaki kulit dan tekstil, ditambah tarif resiprokal 32%, akan menciptakan hambatan komersial yang nyaris mustahil diatasi.



Penerapan tarif resiprokal 32% oleh AS berpotensi menghajar kinerja ekspor Indonesia di berbagai sektor vital. Industri tekstil dan garmen berada di garis depan keterpaparan ini, dengan tarif AS untuk produk pakaian Indonesia yang sudah mencapai 11-14,7% sebelum tambahan 32%.

Industri yang telah membangun rantai nilai kokoh dari komponen dasar hingga produk jadi ini kini menghadapi risiko kehancuran pasar. Sebagai industri padat karya, guncangan pada sektor alas kaki akan langsung menimbulkan gelombang pengangguran yang mengkhawatirkan.

Industri furnitur Indonesia, dengan 57% ekspornya bergantung pada AS, tidak luput dari ancaman ini. Sektor yang secara eksplisit masuk dalam daftar pengenaan tarif ini terkenal dengan keunggulan desain dan bahan alami, namun kenaikan harga drastis akibat tarif berpotensi menghapus keunggulan kompetitifnya di pasar Amerika.

Eksportir karet Indonesia juga berada dalam zona bahaya, dengan 49,7% ekspor ban karet dan 23,2% ekspor karet alam ditujukan ke AS. Setelah berinvestasi besar dalam pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas, industri ini kini terancam kehilangan posisi kompetitifnya akibat lonjakan harga yang dipicu oleh tarif tambahan.

Sektor makanan dan minuman Indonesia juga terjebak dalam pusaran dampak tarif ini. Produk unggulan seperti kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, dan produk perikanan yang menjadikan AS sebagai pasar utama kini menghadapi ketidakpastian. Kompleksitas situasi ini diperparah oleh ketergantungan timbal balik, di mana Indonesia juga mengimpor bahan baku penting dari AS seperti gandum, kedelai, dan susu. Ketegangan dagang berpotensi merusak rantai pasok dua arah yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Industri elektronik dan peralatan listrik Indonesia, dengan 63,3% ekspornya terarah ke AS, menghadapi prospek yang mengkhawatirkan. Sektor yang telah berkembang menjadi kontributor utama dalam ekspor berteknologi menengah Indonesia ini terintegrasi dalam rantai pasok global. Gangguan akibat tarif tidak hanya akan memukul industri elektronik, tetapi juga merambat ke industri hulu seperti logam dan plastik, menciptakan efek domino yang merusak seluruh ekosistem manufaktur.



Sektor makanan dan minuman Indonesia juga terjebak dalam pusaran dampak tarif ini. Produk unggulan seperti kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, dan produk perikanan yang menjadikan AS sebagai pasar utama kini menghadapi ketidakpastian. Kompleksitas situasi ini diperparah oleh ketergantungan timbal balik, di mana Indonesia juga mengimpor bahan baku penting dari AS seperti gandum, kedelai, dan susu.

Meskipun totalnya "hanya" 9% dari keseluruhan ekspor Indonesia, konsentrasi dampak pada sektor-sektor padat karya ini berpotensi menciptakan krisis ketenagakerjaan yang substansial. Efek berantai pada rantai pasok domestik dapat menimbulkan gelombang gangguan ekonomi yang melampaui angka statistik, menuntut respons strategis yang cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia.

Guncangan Makroekonomi: Dari Perlambatan Ekonomi Hingga Gejolak di Pasar Saham

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak hanya berdampak langsung terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam, tetapi juga menimbulkan implikasi luas terhadap stabilitas makroekonomi domestik. Pendekatan perdagangan unilateral yang diusung oleh Presiden Trump berisiko memperlambat aktivitas ekonomi global, terutama karena dinamika dan kemungkinan munculnya tarif balasan dari negara-negara mitra masih terbuka lebar. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang menghambat arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan.

Tekanan global tersebut mulai tercermin dari penurunan harga berbagai komoditas utama. Per 10 April 2025, harga minyak dunia, baik West Texas Intermediate (WTI) maupun Brent Crude, telah terkoreksi masing-masing sebesar 1,32% dan 1,42%. Penurunan ini juga diikuti oleh komoditas lainnya seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara, dua komoditas ekspor unggulan Indonesia. Kombinasi antara tekanan tarif dan pelemahan harga komoditas ini semakin memperburuk kinerja neraca perdagangan Indonesia.

Dari sisi domestik, penurunan ekspor ke AS, terutama pada sektor-sektor padat karya seperti tekstil, elektronik, dan alas kaki, berpotensi mendorong produsen untuk memangkas produksi dan merumahkan pekerja.

“

"Perdagangan internasional tidak hanya mencakup barang, tetapi juga jasa. Oleh karena itu, penetapan reciprocal tariff yang hanya didasarkan pada defisit perdagangan barang, tanpa mempertimbangkan surplus dalam sektor jasa, mencerminkan narasi yang belum sepenuhnya utuh yang dilakukan oleh Trump. Presiden Trump selalu menyoroti sisi defisit neraca perdagangan barang, namun tidak menyinggung surplus yang US peroleh pada perdagangan jasa."

Prof. Dr. Sahara, SP, M.Si

*(Research Associate Professor
CORE Indonesia)*

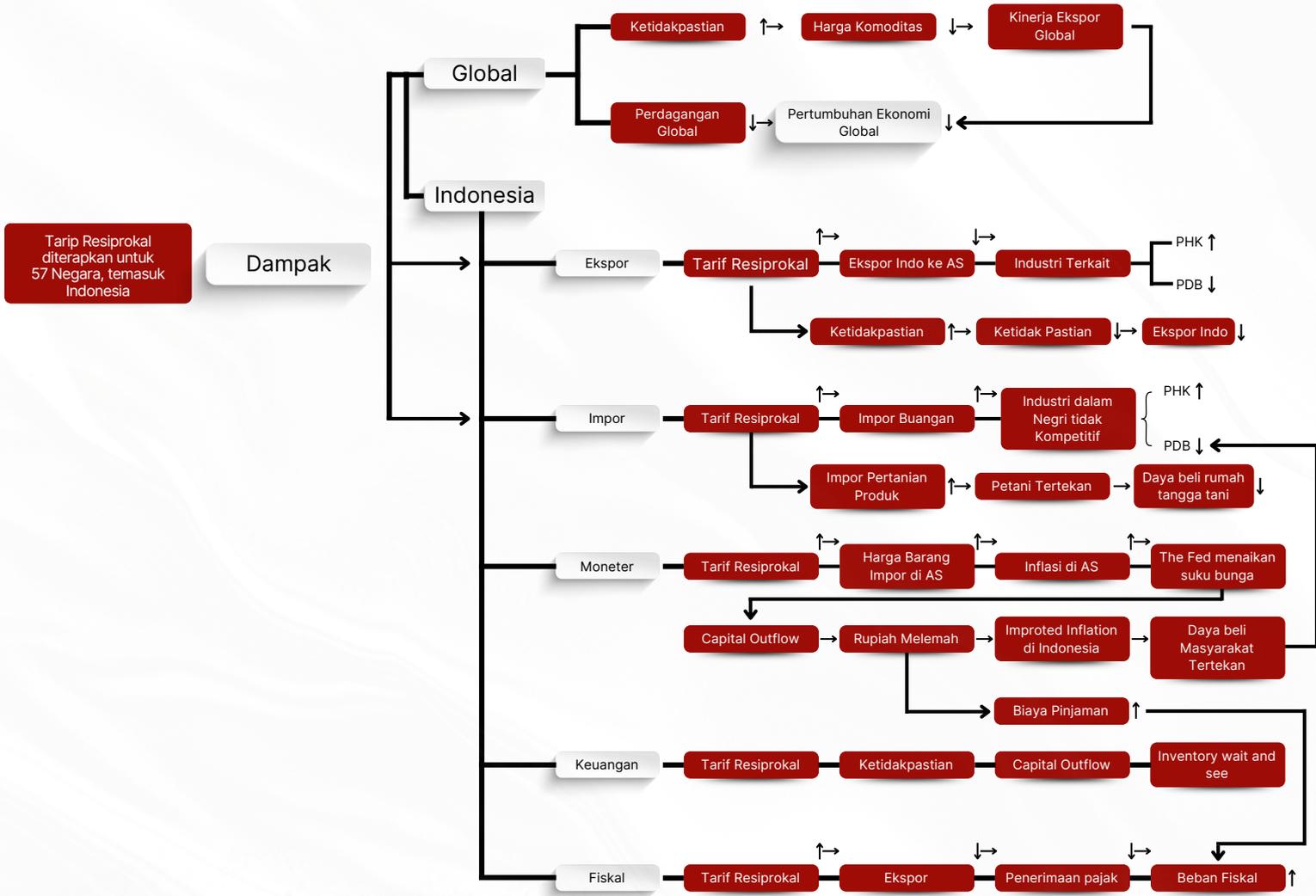


Kondisi ini menyebabkan menurunnya pendapatan rumah tangga dan melemahnya daya beli masyarakat. Di saat yang sama, penurunan penerimaan devisa akibat ekspor yang lesu juga memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah berdampak pada kenaikan harga barang impor dan memicu tekanan inflasi, yang pada akhirnya turut menekan konsumsi domestik sebagai salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dari sisi moneter, kebijakan tarif resiprokal juga membawa risiko tambahan melalui transmisi global. Kenaikan harga barang impor di Amerika Serikat akibat tarif dapat mendorong inflasi di dalam negeri, yang kemudian memaksa Federal Reserve untuk melakukan penyesuaian suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Kenaikan suku bunga The Fed akan memperkuat nilai dolar AS dan menyebabkan aliran modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, seiring pergeseran investor global ke aset-aset yang lebih aman dan berimbal hasil tinggi di AS.

Tekanan terhadap rupiah terlihat jelas dalam pergerakan nilai tukar dalam sebulan terakhir. Pada 28 Maret 2025, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.572,6 per dolar AS, sempat menguat tipis ke Rp16.560 pada 1 April, namun kemudian melemah tajam hingga menyentuh level Rp17.199,2 pada 7 April. Fluktuasi signifikan ini mencerminkan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global serta sentimen negatif terhadap prospek ekonomi negara berkembang.

Jika tren depresiasi rupiah terus berlanjut, tekanan inflasi dari sisi harga barang impor akan semakin tinggi. Dalam skenario ini, Bank Indonesia berpotensi mengubah arah kebijakan dari semula *pro-growth* menjadi lebih fokus pada stabilisasi harga dan nilai tukar. Meskipun kebijakan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar, langkah tersebut dapat memperlambat pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, terutama di tengah upaya pemerintah mendorong investasi dan konsumsi.



Grafik 4. Flow Chart Potensi Dampak Kebijakan Tarif Trump



Tekanan dari sisi fiskal pun tak terelakkan. Menurunnya ekspor dan aktivitas manufaktur bisa berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari pajak ekspor, PPN, dan PPh badan. Sementara itu, depresiasi rupiah menyebabkan peningkatan beban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang didenominasikan dalam dolar AS. Di sisi lain, tekanan inflasi dari barang impor mendorong kebutuhan untuk memperbesar alokasi belanja sosial dan subsidi guna menjaga daya beli masyarakat. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan realokasi anggaran atau bahkan memperluas defisit, sehingga ruang fiskal untuk mendanai program pembangunan dan pemulihan ekonomi jangka menengah menjadi semakin sempit.

Di tengah ketidakpastian tersebut, volatilitas pasar keuangan global akibat ketegangan dagang juga memicu arus keluar modal (*capital outflow*), baik dari pasar saham, obligasi negara, maupun instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Investor global cenderung mengambil sikap *wait and see*, atau bahkan menarik dananya dari negara berkembang dan mengalihkannya ke *aset-aset safe haven*.

Tendensi ini sudah mulai terlihat dalam dinamika pasar keuangan domestik. Dalam sebulan terakhir, Indonesia mencatat *capital outflow* yang cukup signifikan. Bank Indonesia melaporkan arus keluar sebesar Rp 10,15 triliun pada pekan kedua Maret, terdiri dari Rp 5,25 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), Rp 2,97 triliun di SRBI, dan Rp 1,92 triliun di pasar saham. Tren ini berlanjut pada pekan ketiga dengan tambahan *capital outflow* sebesar Rp 4,25 triliun, yang didominasi oleh aksi jual neto investor asing di pasar saham dan SRBI. Secara kumulatif, hingga 26 Maret 2025, total *capital outflow* telah mencapai Rp 33 triliun secara *year-to-date* (YTD), mendekati level tertinggi saat krisis pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 43 triliun.



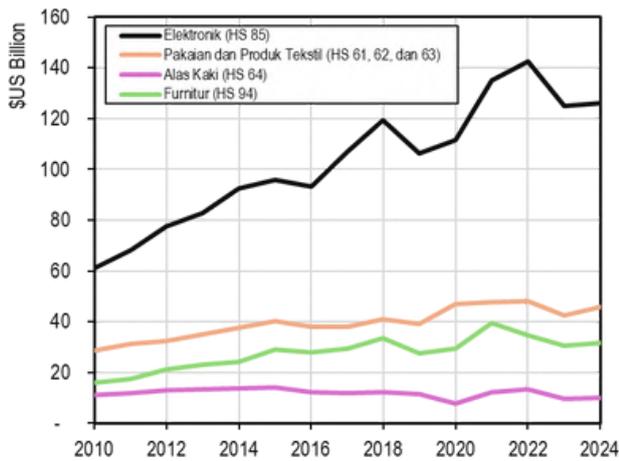
Tekanan dari sisi fiskal pun tak terelakkan. Menurunnya ekspor dan aktivitas manufaktur berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari pajak ekspor, PPN, dan PPh badan. Sementara itu, depresiasi rupiah menyebabkan peningkatan beban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang didenominasikan dalam dolar AS.

Dinamika Ekonomi dalam Negeri di Tengah Serbuan Produk Impor

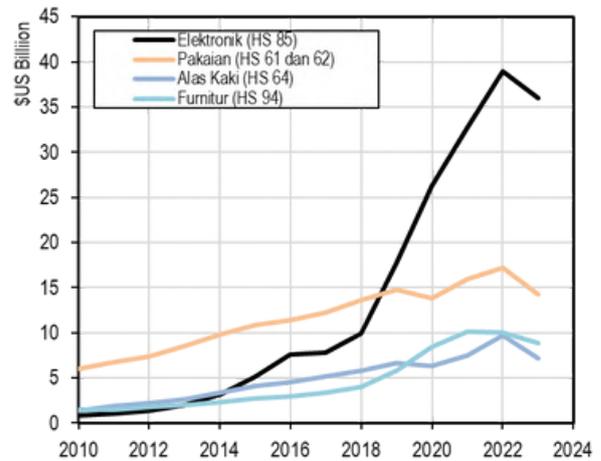
Dampak negatif tarif resiprokal tak hanya mengguncang neraca dagang dan indikator makroekonomi Indonesia, tapi juga mulai mengancam sendi-sendi ekonomi rumah tangga. Ketika ekspor ke Amerika Serikat tersendat, sektor manufaktur, yang menjadi tulang punggung industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur, berisiko terhenti di tengah jalan. Ini bukan sekadar soal penurunan produksi, tapi bisa berubah menjadi gelombang PHK massal yang menghantam langsung dapur keluarga kelas pekerja. Dalam ekonomi yang 55% ditopang oleh konsumsi rumah tangga, tekanan terhadap pendapatan masyarakat berarti bom waktu bagi perlambatan konsumsi nasional. Jika gaji berhenti, belanja pun tertunda; dari warung kelontong hingga industri properti, semua terkena imbasnya.

Namun ancaman tidak berhenti di situ. Ketika AS membatasi atau menutup pintu terhadap barang-barang dari Tiongkok dan Vietnam, negara-negara tersebut mulai mencari 'pelabuhan baru' untuk menyalurkan limpahan produksinya. Indonesia, dengan pasar besar dan kebijakan perdagangan yang relatif terbuka, berisiko menjadi tempat relokasi produk murah dari luar negeri. Inilah saat di mana lonjakan impor barang bisa menyerbu, menghantam industri dalam negeri yang sudah tertekan. Lihat saja industri tekstil, Tiongkok dan Vietnam adalah raksasa dunia dalam hal produksi tekstil dan garmen. Jika produk mereka membanjiri pasar Indonesia dengan harga di bawah biaya produksi, maka industri lokal, yang sudah kewalahan menghadapi biaya energi dan upah, bisa rontok hanya dalam hitungan bulan. Hal serupa mengintai industri elektronik, di mana komponen murah asal Tiongkok bisa melumpuhkan rantai pasok domestik sebelum sempat bersaing

" Ketika AS menutup pintu terhadap barang-barang dari Tiongkok dan Vietnam, negara-negara tersebut mulai mencari 'pelabuhan baru' untuk menyalurkan limpahan produksinya. Indonesia, dengan pasar besar dan kebijakan perdagangan yang relatif terbuka, berisiko menjadi tempat relokasi produk murah dari luar negeri. Inilah saat di mana lonjakan impor bisa menyerbu, menghantam industri dalam negeri "



Grafik 5. Nilai Ekspor Beberapa Produk Unggulan Tiongkok ke Pasar AS
Sumber: Trademap



Grafik 6. Nilai Ekspor Beberapa Produk Unggulan Vietnam ke Pasar AS
Sumber: Trademap

Sektor pertanian pun tak luput dari hantaman kebijakan tarif global ini. Ketika produk pangan impor, mulai dari bawang putih, gula, kedelai, hingga jagung, membanjiri pasar dengan harga miring akibat praktik dumping, petani lokal dipaksa bertarung di arena yang timpang. Mereka kalah harga, kalah skala, dan kalah perlindungan. Ironisnya, produk-produk ini justru masuk masif saat musim panen raya, menyebabkan harga hasil panen jeblok dan petani merugi besar. Lebih miris lagi, ketika petani tercekik, pemerintah malah membuka wacana impor pertanian tanpa kuota dan tarif, sebuah kebijakan yang terasa seperti menggarami luka yang belum sembuh (Kompas, 09/04/2025).

Peluang dan Tantangan di Balik Kebijakan Trump

Meski kebijakan tarif Trump sarat risiko, bukan berarti Indonesia hanya bisa bersikap defensif. Di balik badai, tersimpan peluang yang tak bisa diabaikan. Salah satunya: keunggulan tarif relatif. Di tengah derasnya tarif tinggi bagi negara pesaing, produk ekspor Indonesia justru memiliki celah untuk masuk lebih kompetitif. Vietnam dikenakan tarif 46%, Thailand 36%, sementara Indonesia "hanya" 32%. Bagi pasar AS yang sensitif terhadap harga, selisih ini bisa menjadi pembeda yang menentukan, terutama untuk produk-produk dengan elastisitas harga tinggi seperti tekstil, furnitur, atau alas kaki. Inilah momentum langka yang harus dimanfaatkan dengan cepat dan cerdas.

Peluang lainnya tak kalah strategis: relokasi industri. Ketika tekanan tarif membuat investor hengkang dari Tiongkok dan Vietnam, Indonesia seharusnya menjadi magnet utama relokasi. Namun sejarah membuktikan, kita sempat kecolongan. Pada jilid pertama perang dagang Trump (2016–2021), arus relokasi lebih banyak mengalir ke Vietnam dan Thailand. Indonesia, meski punya pasar besar dan tenaga kerja melimpah, gagal menjadi destinasi utama.

Pengalaman pahit itu memberi pelajaran penting: daya saing tak cukup dari tarif rendah semata. Butuh reformasi nyata. Jika Indonesia ingin merebut gelombang relokasi berikutnya, fondasinya harus diperkuat: kestabilan ekonomi-politik, infrastruktur yang andal, tenaga kerja yang terampil, insentif yang atraktif, dan, yang sering jadi batu sandungan, regulasi yang jelas serta mudah ditegakkan. Tanpa itu semua, peluang hanya akan jadi narasi kosong. Dan Indonesia kembali jadi penonton di tengah panggung pergeseran rantai pasok global.



Namun sejarah membuktikan, kita sempat kecolongan. Pada jilid pertama perang dagang Trump (2016–2021), arus relokasi lebih banyak mengalir ke Vietnam dan Thailand. Indonesia, meski punya pasar besar dan tenaga kerja melimpah, gagal menjadi destinasi utama.

Perluasan Diplomasi Dagang dan Ketahanan Ekonomi Dalam Negeri

Menghadapi ancaman nyata tarif resiprokal AS dan potensi gejolak perdagangan global, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah antisipatif yang bersifat strategis, jangka pendek, menengah, dan panjang. Kebijakan yang diambil harus mencerminkan kesiapan Indonesia menghadapi dinamika ekonomi politik global serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Juga, kebijakan yang diambil jangan sampai hanya bersifat 'reaktif' jangka pendek yang merugikan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Pertama, dari sisi diplomasi ekonomi, pemerintah perlu segera mengaktifkan jalur negosiasi bilateral dengan otoritas perdagangan AS untuk memperoleh kejelasan arah kebijakan dan membuka peluang relaksasi tarif, meskipun saat ini telah diberikan penundaan selama 90 hari. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Pendekatan yang dibangun sebaiknya tidak sekadar teknokratis, tetapi juga berlandaskan pada semangat kemitraan strategis dan keseimbangan kepentingan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengusulkan pengecualian (*exemption*) atau peninjauan ulang terhadap produk-produk ekspor tertentu yang terdampak langsung.

Namun, strategi negosiasi ini tidak boleh dibarengi dengan pelonggaran impor secara serampangan. Setiap kebijakan pembukaan keran impor harus dilakukan secara selektif, berbasis komoditas, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem perdagangan bilateral Indonesia-AS. Pemerintah perlu secara tegas mengecualikan komoditas yang masuk kategori barang sensitif, seperti beras, minuman beralkohol, dan senjata, dari kebijakan pelonggaran tersebut. Bahkan, daftar ini sebaiknya diperluas secara proaktif, menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan nasional.

Lebih jauh, produk-produk pertanian seperti kedelai dan bawang putih yang masih ditanam oleh petani lokal harus tetap dilindungi dengan instrumen tarif dan kuota. Perlindungan ini bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup petani dan ketahanan pangan nasional. Perlu diingat, dalam praktiknya, sistem impor dengan tarif dan kuota pun masih kerap disusupi oleh permainan nakal para importir. Jika kebijakan dibuka tanpa pembatasan sama sekali, risiko distorsi harga dan kehancuran insentif produksi dalam negeri akan semakin besar.

Sementara itu, untuk memaksimalkan hasil timbal balik negosiasi dengan AS, pemerintah perlu memusatkan perhatian pada produk-produk ekspor yang menjadikan AS sebagai pangsa pasar utama. Meskipun secara keseluruhan share ekspor Indonesia ke Asia hanya mencapai 9%, namun untuk beberapa komoditas tertentu, angka share ekspor ke AS jauh lebih besar.

“ produk-produk pertanian seperti kedelai dan bawang putih yang masih ditanam oleh petani lokal harus tetap dilindungi dengan instrumen tarif dan kuota. Perlindungan ini bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup petani dan ketahanan pangan nasional. Perlu diingat, dalam praktiknya, sistem impor dengan tarif dan kuota pun masih kerap disusupi oleh permainan nakal para importir. ”

Hal ini terutama terlihat pada produk seperti pakaian dan aksesoris pakaian, rajutan dan kaitan, serta olahan daging, ikan, krustasea, moluska, atau invertebrata air lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.

Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat	
Product Label	Share in Indonesia's exports, %
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles ...	74
Furskins and artificial fur; manufactures thereof	67
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	61
Preparations of meat, of fish, of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or ...	59
Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; ...	57
Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles ...	54

Tabel 2. Ekspor Indonesia ke AS Berdasarkan Jenis Barang
Sumber: Trademap

Namun demikian, dalam merancang kebijakan dispensasi perdagangan dan investasi sebagai bagian dari strategi negosiasi dengan AS, pemerintah tidak boleh abai terhadap risiko tuduhan discriminatory treatment dari negara mitra lainnya. Tuduhan semacam ini dapat berujung pada pelanggaran prinsip dasar WTO, khususnya prinsip *Most-Favored-Nation* (MFN), yang menuntut perlakuan nondiskriminatif antar-anggota.

Untuk menghindari jebakan tersebut, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap bentuk dispensasi yang dinegosiasikan tetap berada dalam koridor legal WTO. Salah satu pendekatan yang lebih cermat adalah meringkai kebijakan dispensasi ini dalam bentuk perjanjian perdagangan yang lebih komprehensif dan berimbang. Dengan begitu, langkah Indonesia tidak hanya sah secara hukum internasional, tetapi juga memiliki daya tahan politik dalam dinamika perdagangan global yang semakin kompleks.

Kedua, dalam mendorong proses negosiasi, pemerintah perlu secara sistematis melakukan pemetaan menyeluruh (*mapping*) terhadap kebijakan non-tarif (non-tariff measures/NTMs) yang selama ini membebani produk ekspor Indonesia di pasar AS dan juga produk ekspor AS di pasar Indonesia. Hambatan tersebut bisa berupa regulasi teknis, standar sanitasi dan fitosanitasi, aturan pelabelan, sertifikasi, hingga ketentuan perdagangan lain yang berpotensi diskriminatif atau menciptakan distorsi pasar. Pemetaan ini idealnya dilakukan secara sektoral, komoditas demi komoditas, karena tiap sektor memiliki karakteristik pasar, tantangan teknis, dan lanskap regulasi yang berbeda.

Langkah ini krusial agar respons Indonesia tidak jatuh pada kebijakan balasan yang seragam dan berbasis asumsi, tetapi justru mampu melahirkan kebijakan perdagangan yang presisi, adil, dan berlandaskan data. Dalam jangka pendek, hasil pemetaan ini dapat menjadi amunisi penting dalam negosiasi dengan AS, guna menuntut perlakuan yang lebih setara bagi produk ekspor Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang, analisis ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam merancang trade remedies yang kredibel secara hukum internasional, sekaligus menjadi pijakan untuk mendorong efisiensi dan daya saing industri dalam negeri di kancah global.

Ketiga, penguatan instrumen trade remedies menjadi semakin penting untuk mengantisipasi masuknya produk-produk dumping ke pasar domestik. Pemerintah melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) perlu mempercepat investigasi dan memperluas pengawasan terhadap lonjakan impor paska-perubahan kebijakan dagang global. Selain itu, optimalisasi penggunaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMT) dan Bea Masuk Imbalan (BMI) dapat memberikan ruang perlindungan bagi industri dalam negeri yang mulai tertekan akibat persaingan harga tidak sehat.

Keempat, pemerintah perlu mempercepat dan memperluas program diversifikasi pasar ekspor, khususnya ke negara-negara nontradisional. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyelesaian perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Di saat yang sama, pelaku usaha juga harus didorong untuk menyesuaikan strategi ekspor mereka, termasuk dengan mengembangkan produk yang sesuai dengan standar dan preferensi pasar baru tersebut.

Kelima, kebijakan melonggarkan impor dan menghapuskan kuota impor dari AS perlu dilakukan dengan kalkulasi yang matang.



Penguatan instrumen trade remedies menjadi semakin penting untuk mengantisipasi masuknya produk-produk dumping ke pasar domestik. Pemerintah melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) perlu mempercepat investigasi dan memperluas pengawasan terhadap lonjakan impor paska-perubahan kebijakan dagang global.

Indonesia harus waspada terhadap potensi lonjakan impor dari berbagai negara jika pasar terlalu dibuka. Prioritas impor seharusnya diarahkan pada bahan baku dan barang penolong untuk industri, bukan barang jadi atau konsumsi termasuk produk pertanian yang masih ditanam oleh petani kita. Berdasarkan data World Trade Intelligence, beberapa kategori produk AS yang dapat mendukung industrialisasi Indonesia tanpa mengancam produsen lokal antara lain bahan kimia industri (HS 38), mesin-mesin khusus (HS 84), dan bahan baku farmasi (HS 29).

Selain itu, kebijakan impor juga perlu memprioritaskan produk-produk yang secara alami sulit diproduksi di Indonesia dan memiliki Revealed Comparative Advantage (RCA) rendah, seperti gandum (HS 1001, RCA 0,00) dan komponen pesawat (HS 8802, RCA 0,028). Fokus pada kategori produk ini dapat meminimalkan dampak negatif pada upaya substitusi impor yang sedang berjalan.

Keenam, rencana pelonggaran kebijakan TKDN sebagai bagian dari negosiasi dengan AS perlu dikritisi secara serius. Alih-alih menjadi solusi strategis, pelonggaran TKDN justru berisiko merusak arah kebijakan industrialisasi nasional yang tengah dibangun.

Ketidakpastian regulasi akibat perubahan mendadak ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan mengirim sinyal negatif terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat struktur industri dalam negeri. Gagasan untuk menggantikan TKDN dengan skema insentif juga patut dipertanyakan efektivitasnya, karena insentif fiskal tidak serta-merta menciptakan kepastian permintaan terhadap produk lokal. Tanpa peta jalan (*road map*) yang jelas dan konsistensi kebijakan jangka panjang, langkah ini bisa menjadi pintu masuk bagi gelombang deindustrialisasi baru yang semakin menjauhkan Indonesia dari kemandirian manufaktur.

Ketujuh, stabilitas makroekonomi harus tetap menjadi prioritas. Bank Indonesia dan otoritas fiskal perlu menyiapkan respons kebijakan yang adaptif, termasuk langkah-langkah mitigatif terhadap tekanan nilai tukar dan risiko *capital outflow*. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi krusial agar dampak dari dinamika eksternal tidak menular terlalu dalam ke sektor riil dan kesejahteraan masyarakat.

Kedelapan, pemerintah perlu mengembangkan program komprehensif untuk melindungi tenaga kerja di sektor-sektor yang terdampak tarif AS. Program ini dapat mencakup jaring pengaman sosial yang ditargetkan, skema kerja bersama untuk mencegah PHK massal, program pelatihan ulang untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja antar sektor, dan dukungan untuk diversifikasi pasar ekspor. Perlindungan tenaga kerja menjadi semakin penting mengingat tingginya sensitivitas sektor padat karya terhadap tarif impor AS.



Photo by [tawatchai07](#) on [Unsplash](#)

PENANGGUNG JAWAB

Mohammad Faisal, Ph.D

PENASIHAT

Muhammad Ishak Razak, M.A

PENULIS

Yusuf Rendy Manilet, M.Ec.Dev

Azhar Syahida, MIntDevEc

Lailatun Nikmah

DESAIN

Nando Purnama Aji

GAMBAR

Foto TravelScape dari Unsplash

Foto Tawatchai07 dari Freepik

Foto GarryKillian dari Freepik

Foto Marian Croitoru dari Pixabay